

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Organisasi sektor publik di Indonesia mengalami perkembangan yang luar biasa beberapa waktu terakhir ini. Perkembangan ini juga dialami oleh pemerintah (baik pusat maupun daerah), sebagai salah satu bentuk organisasi publik. Kondisi ini semakin menguatkan tuntutan akuntabilitas atas organisasi pemerintahan. Salah satunya akuntabilitas finansial, pemerintah daerah bertanggung jawab untuk mempublikasikan laporan keuangan merupakan posisi keuangan penting yang berasal dari transaksi-transaksi yang dilakukan oleh organisasi sektor publik dan merupakan media sebuah entitas untuk mempertanggungjawabkan aktivitasnya kepada publik selain itu juga berfungsi untuk memberikan informasi dalam pengambilan keputusan dan evaluasi kinerja pemerintahan, maka dari itu informasi yang dijadikan harus memiliki nilai, agar informasi keuangan tersebut dapat bermanfaat bagi penggunaannya menandakan laporan keuangan tersebut berkualitas, dalam hal ini laporan keuangan haruslah memenuhi prinsip-prinsip tepat waktu dan disusun sesuai dengan standar akuntansi pemerintah (SAP), yang merupakan salah satu aspek penting yang diperlukan untuk meningkatkan kualitas laporan keuangan. Menurut UU tahun 2010 tentang SAP dijelaskan bahwa laporan yang disajikan itu berkualitas apabila memenuhi karakteristik kualitatif yaitu relevan, andal, dapat dibandingkan dan dipahami.

Akuntansi sektor publik adalah sistem akuntansi yang dipakai oleh lembaga-lembaga publik, baik akuntansi sektor pemerintah maupun lembaga publik non-pemerintah. lembaga publik mendapat tuntutan dari masyarakat untuk dikelola secara transparan dan akuntabel. Menurut Hehanussa (2015) transparansi akuntabilitas keuangan publik di Indonesia merupakan isu yang semakin mendapat perhatian dalam beberapa tahun terakhir ini. hal ini disebabkan antara lain oleh adanya desentralisasi fiskal dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah sebagai konsekuensi dari otonomi daerah, sehingga menyebabkan perubahan signifikan dalam komposisi pengeluaran anggaran pada pemerintah pusat dan pemerintah daerah.

Transparansi dan akuntabilitas merupakan elemen yang berbeda namun merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. untuk mewujudkan akuntabilitas diperlukan transparansi. jika akuntabilitas keuangan daerah tidak disertai dengan transparansi maka keuangan daerah tersebut bisa jadi sebuah manipulasi dan masyarakat tidak mendapatkan informasi yang semestinya didapatkan. namun pada era sekarang transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan masih belum optimal (Hehanussa,2015). Salah satu prasyarat untuk mewujudkan hal tersebut adalah dengan melakukan reformasi dalam penyajian laporan keuangan, yakni pemerintah harus mampu menyediakan semua informasi keuangan yang relevan secara jujur dan terbuka kepada publik, karena kegiatan pemerintah adalah dalam rangka melaksanakan amanat rakyat. yang ditempuh untuk mewujudkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan adalah dengan mengharuskan pemerintah menyusun suatu laporan keuangan yang dilakukan

dengan melaksanakan kegiatan akuntansi keuangan daerah. agar transparansi dan akuntabilitas dapat terjamin, diperlukannya suatu sistem akuntansi yang baik, dan sistem tersebut dijalankan melalui sistem akuntansi keuangan daerah (SAKD). sistem akuntansi keuangan daerah bertujuan untuk menyediakan informasi keuangan yang berguna untuk perencanaan dan pengelolaan keuangan pemerintah serta memudahkan pengendalian yang efektif atas seluruh asset, hutang, dan ekuitas dana.

Dalam kerangka konseptual akuntansi pemerintahan dalam peraturan pemerintahan Nomor 71 Tahun 2010 lampiran I, menyebutkan bahwa laporan keuangan disusun untuk menyediakan informasi yang relevan mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas pelaporan selama satu periode pelaporan. laporan keuangan merupakan komponen penting untuk menciptakan transparansi dan akuntabilitas dalam sektor publik. adanya tuntutan yang semakin besar terhadap pelaksanaan akuntabilitas publik menimbulkan implikasi bagi manajemen sektor publik untuk memberikan informasi kepada publik, salah satunya adalah informasi akuntansi berupa laporan keuangan (Mardiasmo, 2014 dalam Hehanussa, 2015).

Penyajian laporan keuangan merupakan pengungkapan atas informasi yang menjadi suatu elemen dasar dari transparansi fiskal dan akuntabilitas. penyajian laporan keuangan merupakan hasil akhir dari suatu proses akuntansi. laporan keuangan inilah yang menjadi bahan informasi bagi para pemakainya sebagai salah satu bahan dalam proses pengambilan keputusan. Laporan keuangan sebagai suatu informasi, laporan keuangan juga sebagai bentuk transparansi dan

pertanggungjawaban serta dapat menggambarkan indikator kesuksesan suatu organisasi/instansi mencapai tujuannya. Pemerintah daerah harus bisa menyusun laporan keuangan sesuai dengan standar akuntansi yang diterima umum dan memenuhi karakteristik kualitatif laporan keuangan. Semakin baik penyajian laporan keuangan tentu akan semakin memperjelas pelaporan keuangan pemerintah karena semua transaksi keuangan dilakukan sesuai dengan peraturan yang ada dan akan disajikan dengan lengkap dan jujur dalam laporan keuangan pemerintah daerah. Penyajian informasi yang utuh dalam laporan keuangan akan menciptakan transparansi dan nantinya akan mewujudkan akuntabilitas. Berarti semakin baik penyajian laporan keuangan pemerintah maka akan berimplikasi terhadap peningkatan terwujudnya akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah (Nordiawan,2014)

Menurut Abidin (2014), transparansi juga dapat diartikan bahwa informasi yang berkaitan dengan organisasi tersedia secara mudah dan bebas serta bisa diakses oleh mereka yang terkena dampak kebijakan yang dilakukan oleh organisasi tersebut. Selain itu, informasi yang cukup berkaitan dengan kinerja lembaga tersedia dan dijadikan dalam bentuk atau media yang mudah dipahami.

Penelitian tentang penyajian laporan keuangan daerah, aksesibilitas laporan keuangan daerah, transparansi terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah telah banyak dilakukan. Penelitian yang dilakukan Sande (2013) tentang pengaruh penyajian laporan keuangan daerah, aksesibilitas laporan keuangan daerah dan transparansi terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah (studi empirik pada badan pengelolaan keuangan pemerintah daerah kabupaten malaka). Peneliti

tersebut menyimpulkan bahwa penyajian laporan keuangan daerah dan aksesibilitas laporan keuangan daerah berpengaruh positif terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah. Hal ini menunjukkan bahwa semakin baik penyajian laporan keuangan daerah dan semakin mudah akses terhadap laporan keuangan daerah maka akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah akan semakin baik. Penelitian lain juga dilakukan oleh Riana (2014) tentang Pengaruh Penyajian Laporan Keuangan Daerah, Aksesibilitas Laporan Keuangan Daerah Dan Transparansi Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah (Studi Empiris pada BPKPD Pemerintahan Daerah Kabupaten Malaka). Penelitian tersebut menunjukkan kesimpulan yang sama, yaitu pengaruh penyajian laporan keuangan, aksesibilitas laporan keuangan dan transparansi berpengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah.

Penelitian Wahyuni (2014) menunjukkan hasil bahwa penyajian laporan keuangan tidak berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah. Meningkatkannya penyajian laporan keuangan daerah akan berimplikasi terhadap peningkatan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah. Semakin baik penyajian laporan keuangan daerah akan memberikan informasi yang dibutuhkan oleh masyarakat dan menjadi alat untuk kinerja daerah.

Penelitian Apriliani (2015) menunjukkan hasil bahwa aksesibilitas laporan keuangan daerah tidak berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah. Meningkatnya aksesibilitas laporan keuangan daerah akan berimplikasi terhadap peningkatan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah. Semakin baik

Aksesibilitas laporan keuangan daerah akan memberikan informasi yang dibutuhkan oleh masyarakat dan menjadi alat untuk kinerja daerah.

Menurut penelitian Snde (2013) dan Riana (2014) menunjukkan hasil bahwa penyajian laporan keuangan daerah dan aksesibilitas laporan keuangan daerah berpengaruh positif terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah. Apabila semakin baik penyajian laporan keuangan daerah dan aksesibilitas laporan keuangan daerah akan lebih baik pula akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah pada kinerja daerah.

Menurut penelitian di atas, Wahyuni (2014) dan Apriliani (2015) menunjukkan hasil bahwa penyajian laporan keuangan daerah dan aksesibilitas laporan keuangan daerah tidak berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah bagi para pengguna akan mampu meningkatkan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah. Penelitian ini juga menunjukkan hasil yang tidak berpengaruh. Berdasarkan penelitian terdahulu ada penelitian yang berpengaruh dan ada penelitian yang tidak berpengaruh maka penulis tertarik untuk meneliti tentang Pengaruh Penyajian Laporan Keuangan Daerah, Aksesibilitas Laporan Keuangan Daerah dan Transparansi terhadap Akuntabilitas pengelolaan Keuangan Daerah.

1.2 RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan uraian diatas, maka pokok permasalahan dalam penelitian ini yaitu: pengaruh penyajian laporan keuangan daerah, aksesibilitas laporan keuangan daerah dan transparansi terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah.

1.3 PERSOALAN PENELITIAN

1. Apakah penyajian laporan keuangan daerah berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah pada pemerintahan kabupaten malaka?
2. Apakah aksesibilitas laporan keuangan daerah berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah pada pemerintahan kabupaten malaka?
3. Apakah Transparansi berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah?

1.4 TUJUAN PENELITIAN

1. Untuk mengetahui pengaruh penyajian laporan keuangan daerah terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah.
2. Untuk mengetahui pengaruh aksesibilitas laporan keuangan daerah terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah.
3. Untuk mengetahui pengaruh transparansi terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah

1.5 MANFAAT PENELITIAN

1. Manfaat Akademis

Secara akademis diharapkan hasil penelitian ini dapat berguna sebagai bahan masukan atau referensi bagi peneliti lain yang akan melakukan

penelitian selanjutnya dalam bidang yang sama untuk lembaga Universitas Kristen Artha Wacana khususnya Fakultas Ekonomi.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan memberikan masukan dan membantu dalam Pengaruh penyajian lporan keuangan daerah, aksesibilitas laporan keuangan daerah, dan transparasi terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah, penelitian dan pengembangan Daerah Kabupaten Malaka.